



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI

NOMOR : 53 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG TIM  
PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG SURAT SUARA

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana disampaikan melalui Surat Kepala Biro Logistik Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 48/PP.10.2-SD/07/LOG1/X/2018 tertanggal 31 Oktober 2018 perihal Usulan Revisi Nama Anggota Pokja Katalog Surat Suara Pemilu 2019, dipandang perlu menetapkan penggantian personil Kelompok Kerja Katalog Surat Suara atas nama Gustiar Panjaitan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Tentang Perubahan Atas Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Tim Pemilihan Penyedia Katalog Surat Suara;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764)
4. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 997/HM.03.1-SD/07/SJ/VIII/2018 tertanggal 5 Juli 2018 perihal Usulan Nama Anggota Pokja ULP untuk Lelang E-Katalog Barang/Jasa Kebutuhan Pemilu 2019; dan
5. Surat Kepala Biro Logistik Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 48/PP.10.2-SD/07/LOG1/X/2018 tertanggal 31 Oktober 2018 perihal Usulan Revisi Nama Anggota Pokja Katalog Surat Suara Pemilu 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG TIM PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG SURAT SUARA

KESATU : Diktum KESATU mengenai Pejabat/Pegawai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. Kelompok Kerja Katalog Surat Suara

1. Nama : Rohim Noor  
Instansi : Komisi Pemilihan Umum  
Kedudukan : Ketua
2. Nama : Fandu Dwiadma  
Instansi : Komisi Pemilihan Umum  
Kedudukan : Anggota
3. Nama : Agus Irawan  
Instansi : Komisi Pemilihan Umum  
Kedudukan : Anggota
4. Nama : Wawan Gunawan  
Instansi : Komisi Pemilihan Umum  
Kedudukan : Anggota
5. Nama : Dede Setiawan  
Instansi : Komisi Pemilihan Umum  
Kedudukan : Anggota
6. Nama : I Nyoman Danan  
Instansi : Komisi Pemilihan Umum  
Kedudukan : Anggota
7. Nama : Achmad Andrian  
Instansi : Komisi Pemilihan Umum  
Kedudukan : Anggota
8. Nama : Gustiar Panjaitan  
Instansi : Komisi Pemilihan Umum  
Kedudukan : Anggota
9. Nama : Andi Rosjadi  
Instansi : Komisi Pemilihan Umum  
Kedudukan : Anggota
10. Nama : Eko Rinaldo Octavianus  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah  
Kedudukan : Anggota
11. Nama : Muhammad Harris  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan



- Barang/Jasa Pemerintah
- Kedudukan : Anggota
12. Nama : M.Q. Siddiq Zam  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah  
Kedudukan : Anggota
13. Nama : Sigit Apriyanto  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah  
Kedudukan : Anggota
14. Nama : Muhamad Saifudin  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah  
Kedudukan : Anggota
15. Nama : Lulu Haryani  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah  
Kedudukan : Anggota

Berubah menjadi:

A. Kelompok Kerja Katalog Surat Suara

1. Nama : Rahim Noor  
Instansi : Komisi Pemilihan Umum  
Kedudukan : Ketua
2. Nama : Fandu Dwiadma  
Instansi : Komisi Pemilihan Umum  
Kedudukan : Anggota
3. Nama : Agus Irawan  
Instansi : Komisi Pemilihan Umum  
Kedudukan : Anggota
4. Nama : Wawan Gunawan  
Instansi : Komisi Pemilihan Umum  
Kedudukan : Anggota
5. Nama : Dede Setiawan

- Instansi : Komisi Pemilihan Umum  
Kedudukan : Anggota
6. Nama : I Nyoman Danan  
Instansi : Komisi Pemilihan Umum  
Kedudukan : Anggota
7. Nama : Achmad Andrian  
Instansi : Komisi Pemilihan Umum  
Kedudukan : Anggota
8. Nama : A. A. Semara Putra  
Instansi : Komisi Pemilihan Umum  
Kedudukan : Anggota
9. Nama : Andi Rosjadi  
Instansi : Komisi Pemilihan Umum  
Kedudukan : Anggota
10. Nama : Eko Rinaldo Octavianus  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah  
Kedudukan : Anggota
11. Nama : Muhammad Harris  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah  
Kedudukan : Anggota
12. Nama : M.Q. Siddiq Zam  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah  
Kedudukan : Anggota
13. Nama : Sigit Apriyanto  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah  
Kedudukan : Anggota
14. Nama : Muhamad Saifudin  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah  
Kedudukan : Anggota

15. Nama : Lulu Haryani  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah  
Kedudukan : Anggota

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 November 2018

DEPUTI BIDANG MONITORING-  
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU;
2. Kepala LKPP;
3. Anggota KPU RI Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik;
4. Direktur Pengembangan Sistem Katalog;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.